

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Berdasarkan data *Worldometers*, Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok (1,42 miliar jiwa), India (1,37 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (328 juta jiwa) (*Worldometers*, 2019). Tingginya laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun di suatu wilayah maupun daerah, membuat Indonesia mengalami kenaikan jumlah penduduk yang cukup besar. Akibat penambahan penduduk akan memberikan dampak dengan bermunculan masalah-masalah karena kehidupan yang dinamis. Pertumbuhan penduduk merupakan suatu perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu, yang kemudian dibandingkan dengan waktu sebelumnya (Syam & Wahab, 2015).

Dengan terus bertambahnya jumlahnya penduduk di Indonesia maka akan menjadi tantangan tersendiri terhadap kualitas sumber daya manusia warga Negara Indonesia. Hal ini disebabkan sumber daya manusia merupakan potensi yang terdapat pada diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang bermanfaat. Dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia, maka akan memperoleh makhluk sosial yang yang adaptif dan

transformatif yang dapat mengelola dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Sari, Heriyanto, & Noviardy, (2015) bahwa manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang komprehensif dalam berpikir, mengantisipasi masa depan, memiliki sikap positif mempunyai wawasan, serta memiliki keterampilan, kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga diperlukan berbagai macam usaha untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, karena sumber daya manusia merupakan roda utama penggerak organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Maka kualitas dari sumber daya manusia perlu diperhatikan dan dikelola dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi pada negara Indonesia.

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia dibentuk berdasarkan tiga dimensi dasar yaitu Pertama, pendidikan, yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Kedua, derajat kesehatan yang terbaca dari angka harapan hidup. Ketiga, pendapatan penduduk yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (bps.go.id, 2017). Indeks Pembangunan Manusia menurut standar *United Nations Development Program* (UNDP), terdiri dari 3 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, serta IPM 60-79 kategori sedang (indonesia.go.id, 2019). Berdasarkan data yang diperoleh bps.go.id, (2019) dikatakan pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

mencapai 71,92. Hal ini juga disusul oleh salah satu provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Timur yang merupakan daerah yang terus meningkat tiap tahun pertumbuhan indeks manusianya, didukung dari gambar dibawah ini.

**Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur, 2014-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Oktober 2020

Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2019 terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2018 IPM Jawa Timur mencapai 70,77 dan pada tahun berikutnya mencapai 71,50 (bps.go.id, 2019). Hal ini kemudian disusul oleh beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur yang tergolong indeks pembangunan manusia sangat tinggi di wilayah Jawa Timur. Hal tersebut juga didukung dari data dibawah ini:

**Tabel 1.1 Wilayah Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur**

<b>IPM (wilayah)</b>	<b>Capaian</b>
Surabaya	82,22
Malang	80,89
Madium	80,88

<b>IPM (wilayah)</b>	<b>Capaian</b>
Madiun	80,88
Sidoarjo	80,05
Blitar	78,56
Kediri	78,08
Mojokerto	77,96
Gresik	76,10
Batu	75,88
Pasuruan	75,25

Sumber: Data yang diolah penulis berdasarkan bps.go.id, Oktober 2020

Data diatas menunjukkan beberapa wilayah indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Sidoarjo berada pada urutan ke empat indeks pembangunan manusia dan tergolong kategori sangat tinggi karena capaiannya >80. Dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan/ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu dengan memperhatikan faktor kesehatan (Apriluana & Fikawati, 2018). Salah satu dari hak asasi manusia yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk mengukur kualitas dari sebuah bangsa dapat dinilai dari kualitas kesehatan tiap-tiap warga negara yang ada. Dengan memperhatikan aspek kesehatan ini akan memberikan dampak yang luas terhadap aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti tingkat keberhasilan ekonomi, sistem politik,

kebijakan publik, serta pendidikan mengenai kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat.

Aspek kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional hal ini dikarenakan pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009). Hal ini karena aspek kesehatan merupakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani yang berfungsi untuk pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia, serta modal penggerak pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan aspek kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi setiap orang untuk menerapkan pola hidup sehat agar tercipta lingkungan kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat. Kesehatan lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu keadaan atau kondisi lingkungan yang optimum sehingga memiliki pengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal pula (Fitriany, Farouk, & Taqwa, 2016). Dari pendapat diatas tersebut dikatakan jika kesehatan lingkungan yang berkualitas telah

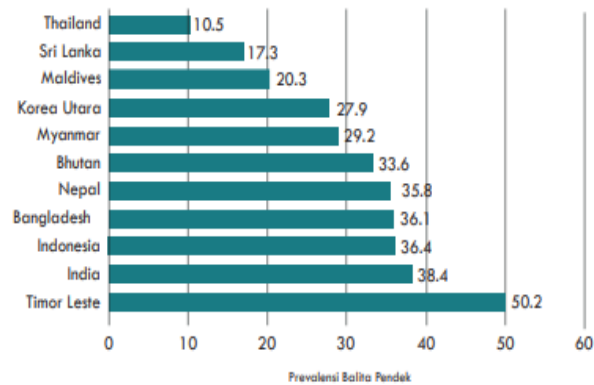
diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat akan tercipta tingkat kesehatan yang optimal.

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap umat manusia. Manusia memerlukan modal dasar untuk meraih tujuan ideal dalam kehidupan individu maupun dalam konteks masyarakat atau sebuah bangsa. Setiap negara harus memperhatikan faktor kesehatan masyarakatnya. Sebuah tolak ukur negara maju dan berkembang bisa diketahui dari bagaimana suatu negara tersebut mengutamakan faktor kesehatan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki peran yaitu berupaya memfokuskan kesehatan masyarakat dengan kesehatan yang merata, adil dan berkualitas. Isu kesehatan masyarakat yang menjadi fokus utama dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah penanganan *stunting* dan angka kematian ibu ([kesmas.kemkes.go.id](http://kesmas.kemkes.go.id), 2020). *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pada 2018, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa data Kemenkes mencatat sebanyak 3 dari 10 anak Indonesia bertubuh pendek. *Stunting* merupakan ancaman utama terhadap kualitas sumber daya manusia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang terkena *stunting*, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia

produktif. Berdasarkan gambar dibawah ini menunjukkan bahwa Indonesia masih buruk dalam hal penanggulangan stunting.

**Gambar 1.2 Rata-Rata Prevalensi Balita Pendek di Regional Asia**

Tenggara Tahun 2005-2018



Sumber: Buletin Stunting Kementerian Kesehatan RI, Oktober 2020

Berdasarkan grafik data prevalensi balita *stunting* yang dikumpulkan *World Health Organization* (WHO), Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi *stunting* tertinggi di regional Asia Tenggara/*South-East Asia Regional* (SEAR). Rata-rata prevalensi balita *stunting* di Indonesia tahun 2005-2018 adalah 36,4%. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk menangani permasalahan tersebut dengan mendirikan sebuah lembaga baru yang bernama Tim Nasional Percepatan Penurunan Stunting (cnnindonesia.com, 2020). Masalah *stunting* jika tidak ditangani secara serius, diperkirakan akan terus meningkat pertambahan kasusnya setiap tahunnya. Berdasarkan Tim Nasional Percepatan Penurunan Stunting, Gerakan 1.000 HPK masih memiliki kekurangan dalam praktiknya di lapangan.

Misalnya, kurangnya komitmen, integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa masalah kesehatan gizi buruk alias stunting di Indonesia masih sangat perlu dilakukan penanganan yang tepat. Pencegahan stunting merupakan program yang wajib dan harus dilakukan oleh pemerintah yang bersangkutan, mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga desa. Sebab jika program ini tidak dilaksanakan akan menghambat pertumbuhan kecerdasan anak bangsa, karena selain tubuhnya yang kerdil, otaknya juga terbelakang dan mengakibatkan kecerdasannya rendah. Anak merupakan aset bangsa di masa depan. Bisa dibayangkan, bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang jika saat ini banyak anak Indonesia yang menderita *stunting*. Bangsa ini akan tidak mampu bersaing dengan bangsa lain dalam menghadapi tantang global. Ditambah hal ini juga akan menghambat bonus demografi pada tahun 2030 yang akan datang (antaranews.com, 2018). Maka, perlu untuk mencegah hal tersebut terjadi dan harus segera diatasi. Menurut Saputri & Tumangger, (2019:1) sangat diperlukan sosialisasi secara massif terkait *stunting*, dampak yang ditimbulkan, urgensi penanggulangannya, dan upaya penanggulangan *stunting* pada tataran akar rumput, sebagai bentuk upaya preventif individual tanpa bergantung pada program pemerintah saja, sebab penanggulangan stunting adalah masalah mendesak yang mesti ditangani oleh semua pihak dengan segera tanpa menunggu apapun. Sedangkan pendapat lain Prahastuti (2020:63) mengatakan bahwa penerapan model *Public Private Partnership* untuk pencegahan



*stunting*. Regulasi dan kebijakan terkait 1000 HPK, regulasi ASI eksklusif, penanggulangan *stunting* sudah ada payung hukumnya dari pusat, yaitu diantaranya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit.

Jawa Timur merupakan Provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Jawa bagian Timur. Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 Kota ini tidak luput dari berbagai persoalan yang harus diselesaikan. Ada tiga inti permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta pengangguran (its.ac.id, 2018). Tiga permasalahan ini dapat menimbulkan permasalahan lainnya jika tidak diatasi. Salah satunya yaitu timbulnya masalah kesehatan. Jawa Timur adalah satu dari sekian banyak provinsi di Indonesia yang memiliki masalah kesehatan cukup serius. Masalah kesehatan ini yaitu tingginya kasus *stunting* di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur se Indonesia. Sejalan dengan pendapat Retno, Baiquni, & Kurniawan, (2019) mengatakan sebagai proksi indikator terkait dengan pangan, permasalahan *stunting* nampaknya masih menjadi permasalahan sebagian besar propinsi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari berita sebagai berikut:

**“JAKARTA-** Dr Sri Kusyuniati, Country Direction NI (Nutrition Internasional), mengatakan Menghimpun data nasional pada tahun 2019, prevalensi angka *stunting* Indonesia menyentuh angka 27,7 persen. Dengan wilayah NTT menyentuh angka 42,6 persen, sementara Jawa Timur menyusul dengan persentase 32,8 persen. Dikutip dari berita (indonesiainside.id, 2020).” diakses pada 8 Oktober 2020

Berita diatas tersebut di dukung dengan data sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Kasus Stunting di Pulau Jawa**

Wilayah	Prevelensi (%)
Jawa Timur	32,8
Jawa Tengah	31,2
Jawa Barat	31
Banten	23,2
Daerah Istimewa Yogyakarta	21,4
DKI Jakarta	17,7

Sumber: Data yang diolah peneliti berdasarkan Riskesdas tahun 2018, Oktober 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tingkat stunting di Jawa Timur dimana daerah yang merupakan Provinsi dengan pertumbuhan indeks pembangunan manusia meningkat tiap tahunnya ternyata Jawa Timur meninggalkan ketimpangan. Hal ini terbukti dari data diatas tersebut. Jawa Timur menduduki wilayah tertinggi kasus stunting di Pulau Jawa, yang kemudian disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Permasalahan gizi yang penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus di Indonesia adalah masalah anak pendek (*stunting*). Kasus *stunting* menjadi permasalahan karena jika tidak diatasi dengan tepat karena dapat meningkatkan resiko terjadinya kesakitan, memperlambat perkembangan otak, pertumbuhan mental yang terhambat, bahkan yang lebih parah yaitu bisa menyebabkan kematian. Menurut Norcahyanti, Pratama, & Pratoko, (2019) *stunting* merupakan kondisi dimana terdapat gangguan pertumbuhan fisik berupa penurunan kecepatan pertumbuhan secara linear, sehingga

mengakibatkan anak gagal dalam mencapai porsi tinggi badan yang ideal. Pendapat lain mengatakan Helentina, (2019) *stunting* atau disebut “pendek” merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi (0-11 bulan) dan anak balita (12-59 bulan) akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. *Stunting* disebabkan oleh faktor multidimensi, diantaranya pola pengasuhan gizi yang kurang baik, termasuk kurang pegetahuannya ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan.

Dampak yang ditimbulkan dari kondisi *stunting* ini bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Dampak dari *stunting* yaitu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja. Hal ini dikarenakan buruknya kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap pengembangan potensi bangsa ini. Beberapa penelitian menunjukkan resiko yang diakibatkan *stunting* yaitu menurunnya kekebalan tubuh, sehingga anak mudah sakit (Norcahyanti et al., 2019), menurunnya kemampuan kognitif anak dimana tingkat kecerdasan rendah (Budiastutik & Rahfiludin, 2019), serta peningkatan resiko penyakit degeneratif (diabetes, hipertensi, jantung, ginjal) (Saputri & Tumangger, 2019). Hal ini sejalan dengan pendapat Muldiasman, Kusharisupeni, & Laksminingsih, (2018) yang mengatakan bahwa “*Children who do not get an early initiation to breastfeeding are times more likely to be stunted than those who are breastfed early*” yang berarti menunjukkan bahwa anak yang tidak dapat inisiasi menyusui dini lebih mungkin mengalami *stunting* dibanding mereka yang

disusui lebih awal. Dapat dipahami bahwa inisiasi menyusui dini atau IMD adalah proses untuk memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan. Sehingga dapat dikatakan inisiasi menyusui dini sebagai salah satu bentuk asuhan ibu dan pemberian nutrisi terbaik sejak dini yang dapat menurunkan risiko stunting.

Prevalensi nasional untuk masalah kurang gizi kronis (*stunting*) berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, tahun 2018 pada balita umur 0 sampai 59 bulan di Jawa Timur mencapai 32,8%. Angka ini lebih tinggi dari pada prevalensi stunting nasional yakni sebesar 30,8%. Sehingga masalah gizi (*stunting*) sangat perlu mendapatkan perhatian khusus karena prevalensinya yang masih tinggi dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20%. Untuk dapat memetakan kondisi buruknya pengentasan stunting di Jawa timur perlu dilihat data dibawah ini. Jawa Timur mencatat beberapa wilayah kasus stunting di Jawa Timur. Total sebanyak 344.019 balita menderita stunting atau gizi buruk di Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Fokus Wilayah Kasus Stunting Jawa Timur**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah</b>
Sidoarjo	24.439 balita
Banyuwangi	21.266 balita
Sampang	19.309 balita
Pasuruan	18.530 balita
Probolinggo	17.906 balita

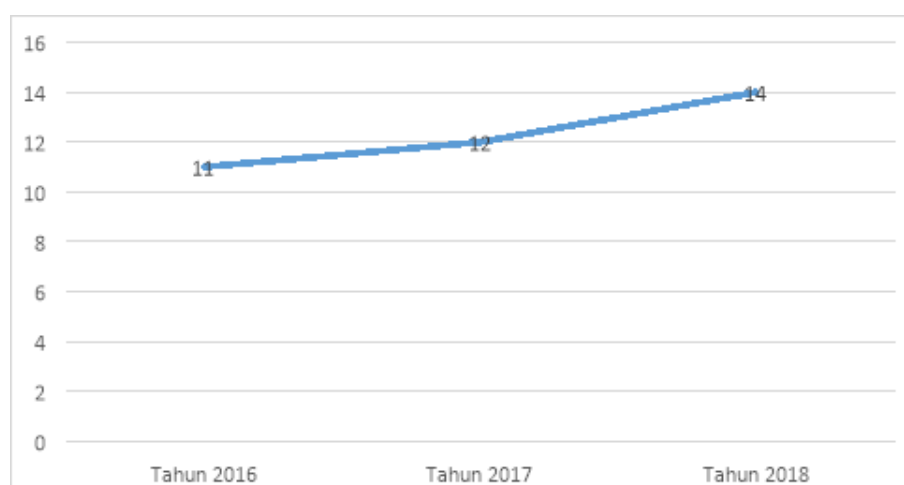
Kabupaten/Kota	Jumlah
Blitar	16.507 balita
Malang	13.598 balita
Nganjuk	13.345 balita
Kediri	13.313 balita
Jember	12.607 balita
Jombang	12.11 balita

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan (e-PPGBM)

radarsurabaya.jawapos.com, Oktober 2020

Berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah dengan jumlah balita stunting tertinggi se Jawa Timur. Hal ini juga didukung dengan grafik sebagai berikut:

**Gambar 1.3 Tren Balita Gizi Buruk (*Stunting*) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2018**



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Oktober 2020

Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah dengan peringkat ke empat wilayah Indeks Pembangunan Manusia sangat tinggi setelah Kota Surabaya, Malang, dan Madiun. Hal ini dikarenakan berdasarkan data di atas dapat diketahui jika Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah dengan balita stunting tertinggi se Jawa Timur. Selain itu, tren masalah balita stunting di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan tiga tahun terakhir.

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 714.243 Km<sup>2</sup>, 40,81% nya terletak di ketinggian 3-10 m yang berada di bagian tengah dan berair tawar, 29,99% berketinggian 0-3 meter berada di sebelah timur dan merupakan daerah pantai dan pertambakan, sedangkan 29,20% terletak di ketinggian 10-25 meter di bagian barat. Total kecamatan yang ada yaitu 18 kecamatan. Wilayah dengan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Waru dengan jumlah penduduk sebesar 210.592 jiwa. Sedangkan wilayah dengan penduduk terendah ada di Kecamatan Jabon dengan jumlah penduduk 58.274 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 yaitu mencapai 2,262.440 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 1.140.627 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.121.813 jiwa ([portal.sidoarjokab.go.id](http://portal.sidoarjokab.go.id), 2019). Dengan begitu dapat dikatakan Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah yang padat penduduk. Mengingat pentingnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak, maka salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi yaitu dari segi aspek kesehatan, dimana kesehatan berperan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang memiliki dampak terhadap pembangunan nasional, khususnya masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota. Tingginya angka stunting menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, tak terkecuali Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Selain Undang-Undang, Peraturan Menteri, tercantum juga Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk menekan angka stunting di wilayah Sidoarjo. Dalam hal ini peran dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo sangat diperlukan dalam menekan angka stunting di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai peran dinas kesehatan dalam pelayanan kesehatan prima, yang mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh dinas kesehatan belum secara optimal dalam melaksanakan perannya (Putri, 2013). Menurut Soerjono & Sulistyowati (2015:210) peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Hal ini sejalan dengan peran yang harus dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk menekan stunting di wilayahnya. Oleh karena itu peneliti ingin mengisi kekosongan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai peran *stakeholder* dalam penanggulangan stunting.

Pada tahun 2020 ini Dinas Kesehatan Sidoarjo memprioritaskan wilayah-wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih khusus mengenai masalah stunting. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui cakupan wilayah program intervensi penurunan stunting di tiap-tiap wilayah kecamatan yang menjadi fokus Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Cakupan Wilayah Penurunan Stunting**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>
Jabon	494 balita
Candi	316 balita
Buduran	208 balita
Gedangan	448 balita
Balongpendo	94 balita

Sumber: Dinas Kesehatan kabupaten Sidoarjo, Oktober 2020

Dari data diatas menunjukkan beberapa wilayah kecamatan beserta jumlah kasus stunting yang ada. Dapat diketahui bahwa Kecamatan Jabon merupakan kecamatan yang paling banyak terdapat balita stunting sejumlah 494. Permasalahan balita stunting di Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah dengan jumlah kasus stunting tertinggi se Jawa Timur tidak berbanding lurus dengan indeks pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang tergolong kategori sangat tinggi. Salah satu dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia adalah angka harapan hidup, ada tiga pengaruh penentu angka harapan hidup yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan angka kematian balita. Dalam wawancara dengan Kasi Kesehatan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Sidoarjo, Sri Andari



membenarkan bahwa pada tahun 2019 kasus kematian bayi turun mencapai 150 kasus, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 157 kasus. Meskipun terjadi penurunan angka kematian bayi tetapi *stunting* masih menjadi fokus utama (Sidoarjonews.id, 2019). Hal ini sejalan dengan data yang penulis peroleh dari Dinas Kesehatan Sidoarjo bahwa wilayah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kecamatan dengan balita terbanyak *stunting* diduduki oleh Kecamatan Jabon, dimana Kecamatan Jabon merupakan wilayah dengan penduduk terendah di Kabupaten Sidoarjo.

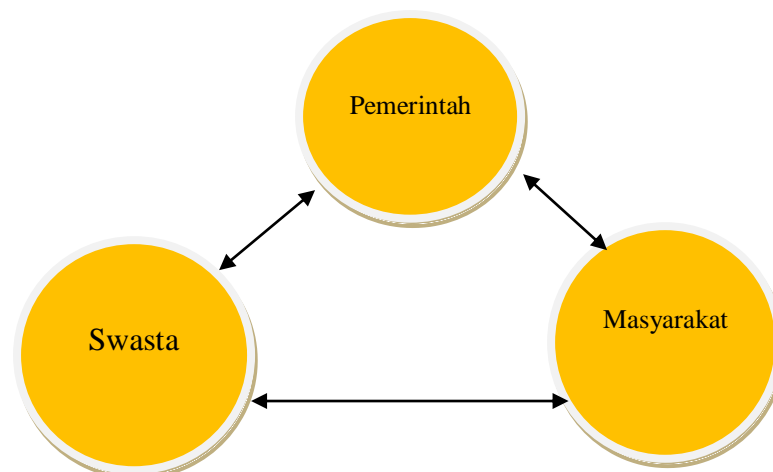
*Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik di era reformasi dewasa ini (Sasundame, Tulus, & Kalangi, 2016). *Good Governance* muncul dikarenakan kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. *Good Governance* merupakan harapan dari masyarakat yang menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat (Spiteri & Briguglio, 2018) yang mengatakan “*Highlight the importance of good governance in fostering trust in government*” yang berarti pentingnya menyoroti tata kelola yang baik dalam menumbuhkan kepercayaan pada pemerintah.

Dalam praktiknya *Good Governance* menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan semata-mata untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik (Saribu, 2017). *Good governance*

merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bertanggung jawab serta bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). *Good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik. Sehingga diharapkan dari penerapan *good governance* dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia.

Salah satu model pengelolaan tata pemerintahan di Indonesia adalah melalui model *Good Governance*. Pada model ini pemerintah (*state*) bukanlah satu-satunya aktor, tetapi ada dua aktor lain diluar pemerintah yaitu swasta (*businesses*) dan masyarakat (*civil society*). Dimana jika digambarkan dalam bentuk gambar seperti ini:

**Gambar 1.4 Aktor *Good Governance***



Sumber: Abd. Rohman dan Willy Tri Hardianto, Oktober 2020

Pemerintah sebagai aparatur negara mempunyai peran utama yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak setiap warga negara atau penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Selain itu pemerintah dan masyarakat saling memiliki hubungan antara satu sama lain sesuai dengan posisi dan peran masing-masing. Menurut Rohman & Hardianto (2019:74) menjelaskan bahwa pemerintah harus melaksanakan pelayanan dalam hal kebutuhan dan keinginan masyarakat. Namun seiring perkembangan jaman pemerintah harus melibatkan pihak lain yaitu swasta dan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien.

Istilah *good governance* berkonotasi pada bagaimana pemerintahan dalam suatu negara mampu mendistribusikan pengelolaan masalah yang ada kepada pihak-pihak lain diluar pemerintah. Selanjutnya UNDP dalam Nugroho (2018:68) mengatakan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Atas dasar ini, maka disusun Sembilan prinsip *good governance*, yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*. Namun seringkali dalam praktiknya *good governance* tidak berjalan semestinya, dikarenakan pemerintah yang dianggap kurang melakukan kerjasama terhadap aktor lainnya yaitu swasta dan masyarakat. Dengan demikian penerapan *good*

*governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya konsep *good governance* merupakan kunci utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Oleh sebab itu maka peneliti akan berfokus pada prinsip-prinsip *good governance* dilaksanakan oleh stakeholder dalam penanggulangan *stunting*. Sehingga keterlibatan *stakeholder* dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan *stunting*. Menurut Budimanta (2008) dalam Lindawati & Puspita (2015:162) *stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh berbagai keputusan, kebijakan. Karena untuk dapat memaksimalkan penurunan *stunting* tidak dapat dilakukan satu pihak saja, diperlukan kontribusi dari semua pihak. *Stakeholder* yang berperan dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sidoarjo adalah pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah disini ada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama dengan Puskesmas Jabon, lalu pihak swasta yang terlibat yaitu Perusahaan Gas Negara, dan masyarakatnya dari kelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Jabon. Keterlibatan *stakeholder* ini diperlukan karena kasus *stunting* yang masih tinggi di wilayah Indonesia, khususnya Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Jabon, sehingga diharapkan tidak hanya pemerintah terkait yang terlibat dalam penanggulangan *stunting* ini tetapi adanya keterlibatan dari pihak swasta dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul **“Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Dalam Penanggulangan *Stunting* Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana Pelaksanaan Prinsip *good governance* Dalam Penanggulangan *Stunting* Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan, Menganalisa, dan Mengidentifikasi pelaksanaan prinsip *Good Governance* dalam penanggulangan *stunting* di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik penyusun sendiri maupun pihak yang lain. Terutama kalangan akademis atau masyarakat umum yang juga perlu mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan prinsip *Good Governance* dalam penanggulangan *stunting* di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance*, serta

juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sebagai ilmu pengetahuan baru dan menambah pengalaman bagi penulis sehingga hal ini dapat menjadi bahan sebuah referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

### b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa yang akan datang, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menambah referensi khususnya di Ruang Baca (Perpustakaan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Administrasi Publik.

### c. Bagi Instansi/Dinas/Pihak Lainnya

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Puskesmas Jabon serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi *stakeholder* terkait dalam masalah penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sidoarjo.